

# 10. Jur\_Nasional\_Kajian Kerjasama Kepsek dengan Komite Sekolah

*by Amka Amka*

---

**Submission date:** 23-Sep-2019 06:10AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1177673258

**File name:** Jur\_Nasional\_Kajian\_Kerjasama\_Kepsek\_dengan\_Komite\_Sekolah.docx (119.82K)

**Word count:** 3120

**Character count:** 21902

# KAJIAN TENTANG KINERJA KERJASAMA KEPALA SEKOLAH DENGAN KOMITE SEKOLAH DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT

Amka  
FKIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM)  
email: amkafkipulm@gmail.com

## Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja kerjasama antara kepala sekolah dan komite sekolah dalam mewujudkan pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat. Penelitian ini disebut penelitian survei dengan instrumen kuesioner sebagai alat pengumpul data. Sampel diambil secara random sampling dari beberapa kepala sekolah dan komite sekolah di Kalimantan Selatan. Analisis data adalah deskriptif kualitatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kinerja kerjasama antara komite sekolah dan kepala sekolah tidak sesuai dengan semangat Kepmendiknas Nomor 44 tahun 2002 dimana regulasi ini mendorong kepala sekolah dan komite sekolah seharusnya membangun kerjasama dalam merancang pendidikan di sekolah yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tahap refleksi. Hal ini dipengaruhi lemahnya pemahaman tentang peraturan pemerintah tentang kerjasama secara mutual.

**Kata Kunci:** Kerjasama, komite, dan masyarakat

## Abstract

This study aims to find out the cooperation performance between school principals and the school committees in realizing the implementation of community-based education. This research is called survey research with questionnaire as the instrument of data collection. The samples were taken by random sampling from some school principals and school committees in South Kalimantan. The data analysis is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the cooperation performance between the school committees and school principals is inconsistent with spirit Kepmendiknas Number 44 of 2002 in which it drives school committees and school principals cooperate in designing the education in school starting from the planning, implimenting, evaluating, and reflecting. This is influenced by the weak understanding of government regulations on mutual cooperation.

**Key Words:** Cooperation, committee, and society.

## PENDAHULUAN

Keberhasilan pendidikan dipengaruhi banyak faktor yang saling terkait. Salah satu faktor tersebut adalah keterlibatan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan yang dimulai dari bantuan pemikiran, sarana dan prasarana, pembiayaan serta aspek lain. Selain itu, kinerja kepala sekolah juga menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Kedua unsur ini perlu melakukan kerjasama kolaboratif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Secara yuridis, tuntutan keterlibatan masyarakat itu ditetapkan dalam Kepmendiknas nomor 44 tahun 2002 tentang komite sekolah sebagai lembaga resmi yang menjadi mitra sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Tujuan, peran dan fungsi komite sekolah telah diatur secara jelas dalam peraturan ini. Salah satu bunyi dari poin tersebut adalah komite

sekolah bekerjasama dengan kepala sekolah untuk mengelola pendidikan.

Berdasarkan studi awal, sebagian besar dari sekitar 3780 Komite Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan belum menjalankan peran dan fungsi sesuai Kepmendiknas nomor 44 tahun 2002 tersebut. Sementara itu, Kepala Sekolah sebagai pelaksana juga masih belum memfungsikan Komite Sekolah dengan semestinya. Kerjasama yang dilakukan antara Komite Sekolah dengan Kepala Sekolah belum optimal karena berbagai kendala. Model kerjasama antara dua lembaga ini belum terbentuk secara sempurna.

Belum adanya model ideal dalam melakukan kerjasama antara Komite Sekolah dengan Kepala Sekolah ini menjadi faktor penghambat serius, selain faktor lain. Kenyataan ini menunjukkan

bahwa pemahaman dan keterampilan komite dan kepala sekolah merupakan hal yang penting sehingga mampu menjalankan tugas dengan baik. Dengan harapan, kedua lembaga ini bisa bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga program mewujudkan pendidikan berbasis masyarakat cepat tercapai. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja kerjasama antara kepala sekolah dan komite masyarakat dalam mewujudkan pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat. Penelitian ini disebut penelitian survei dengan instrumen kuesioner sebagai alat pengumpul data. Sampel diambil secara random sampling dari beberapa kepala sekolah dan komite sekolah di Kalimantan Selatan. Analisis data adalah deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN

### Komite Sekolah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan tidak mungkin dilaksanakan pemerintah saja karena keterbatasan sumberdaya dan dana. Pemerintah sudah serius menangani mutu pendidikan, tetapi keterbatasan dana mengakibatkan tidak bisa berbuat banyak. Untuk itulah partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 54-56 dijelaskan tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Secara kelembagaan, peran serta masyarakat diwadahi dalam Dewan Pendidikan sampai Komite Sekolah. Secara tegas, bunyi UU ini menegaskan bahwa Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri dan dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan arahan, pertimbangan dan dukungan tenaga, pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, serta sarana dan prasarana. Ini juga sejalan dengan upaya mewujudkan pendidikan berbasis masyarakat yang dijelaskan dalam UU tersebut.

Merujuk juga pada konsep desentralisasi pendidikan yang menekankan pada penangan pendidikan pada tingkat sekolah, masyarakat secara langsung

bertanggung jawab atas keberadaan dan proses pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan harus melibatkan masyarakat setempat sehingga keberadaan sekolah sesuai kebutuhan masyarakat (Asrohah: 2004).

Samani (2001) mengatakan bahwa sekolah bukan Kepala Sekolah. Ini berarti bahwa ada komponen lain, termasuk masyarakat. Kepala Sekolah perlu mendapat pendamping dalam mengelola pendidikan. Dengan demikian, di masyarakat akan terjadi perubahan sikap dari hanya menitipkan anak menjadi pemilik sekolah. Hal ini akan terjadi apabila partisipasi masyarakat sudah berjalan.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan ini secara formal diartikan turut serta secara mental dan emosional untuk memberi sumbangan pada keberlangsungan aktifitas pendidikan (Draha:1990). Sumbangan ini bisa berupa bahan, sarana, dana, serta jasa.

Namun partisipasi masyarakat ini terkadang belum digali secara penuh oleh sekolah, terutama kepala sekolah sebagai pelaksana langsung pendidikan sehingga upaya meningkatkan partisipasi masyarakat menjadi minim (Nursito: 2002). Supriono (2001) juga menambahkan bahwa kurang optimalnya partisipasi masyarakat ini terjadi karena kepala sekolah kurang peka terhadap sumber daya yang ada pada masyarakat. Padahal keterlibatan stake holders sekolah cukup menentukan keberhasilan pendidikan.

Fukuyama (2002) mengatakan, partisipasi masyarakat akan tumbuh ketika masyarakat memiliki keyakinan, merasakan manfaat dari tindakan partisipasi yang berlangsung serta tumbuh percaya di antara masyarakat dan sekolah. Namun apabila masyarakat tidak merasakan partisipasi yang berlangsung, maka kerjasama komite sekolah dan kepala sekolah dalam mewujudkan pendidikan berbasis masyarakat sulit terwujud.

Danzberger dan Funth (dalam Wahjo Sumidjo, 1999) menambahkan bahwa kualitas kehidupan masyarakat dapat meningkat jika kepala sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang baik dan kemitraan yang dinamis.

Pentingnya peran masyarakat ini ditegaskan oleh Abbas (2001) yang mengatakan bahwa pembuat keputusan menyarankan bahwa kelompok masyarakat terlibat dalam bentuk penyampaian pendapat, saran, jasa dan bahan pemikiran dalam penyelenggaraan pendidikan. Sumarno (2004) mengatakan perlunya partisipasi ini dikarenakan :

1. Besarnya sumber daya dan dana yang diperlukan dalam pendidikan;
2. Terbatasnya fasilitas yang disediakan pemerintah dalam pendidikan;
3. Masyarakat memiliki potensi besar dengan berbagai jenis;
4. Upaya kemandirian masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
5. Partisipasi menjadi salah satu ukuran keberhasilan pendidikan.

Namun kenyataannya partisipasi masyarakat ini belum sepenuhnya optimal karena beberapa kendala sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Untuk itu, upaya pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan. Kerjasama antara komite sekolah dengan kepala sekolah perlu dirancang dan ditemukan model yang ideal agar peran dan fungsi bisa berjalan dengan baik.

Dalam konsep manajemen berbasis sekolah, kerjasama antara sekolah dengan masyarakat yang bisa diwadahi dalam Komite Sekolah perlu dikembangkan. Begitu juga dalam konsep pendidikan berbasis masyarakat yang menekankan keberhasilan sekolah ditentukan model kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pengelola sekolah atau Kepala Sekolah. Keterlibatan komite sekolah menjadi sangat penting.

#### **Keterampilan Kepala Sekolah dalam Bekerjasama**

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah ini dipengaruhi oleh keterampilan kepala sekolah dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat. Compbel (dalam Mantja W, 2002) mengatakan bahwa kepala sekolah bukan hanya bertugas secara administratif, namun juga memiliki tugas komprehensif. Salah satunya adalah menjalin hubungan kemanusiaan dengan masyarakat. Sebab dengan langkah inilah

dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan akan terbangun.

Pidarta (1988) menambahkan bahwa kepala sekolah harus memiliki tiga keterampilan, yaitu: 1) keterampilan terkait konseptual, yaitu pemahaman dan kemampuan untuk mengoperasionalkan organisasi sekolah, (2) keterampilan terkait manusiawi, yaitu keterampilan melakukan kerjasama, memimpin dan memotivasi, (3) keterampilan terkait teknis, yaitu kemampuan menerapkan metode-metode dalam pengelolaan sekolah.

Untuk itu, kepala sekolah perlu memiliki keterampilan untuk memberi motivasi kepada masyarakat serta memberi kesempatan masyarakat atau komite sekolah untuk berperan dalam pengelolaan pendidikan. Selain itu, ia mampu melakukan pendekatan dan selalu melakukan komunikasi dengan masyarakat.

Hasil penelitian Rumapea (2005) tentang Hubungan Kewenangan Kepala Sekolah dengan Kinerja Guru menyatakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah akan berjalan dengan baik apabila kepala sekolah menggunakan kewenangan yang sesuai dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Pemberian otonomi kepada sekolah harus makin memberdayakan kepala sekolah dalam menangani pendidikan.

#### **Pendidikan Berbasis Masyarakat**

Konsep dasar pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pengelolaannya melibatkan masyarakat secara optimal. Ini sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam sektor pendidikan nasional yang diorientasikan pada penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata serta pemberdayaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan (Rodli: 2005). Salah satu indikator kinerjanya adalah tersusunnya konsep pendidikan secara matang, membentuk dewan pendidikan hingga komite sekolah, serta meningkatkan peran dan fungsi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran dan fungsi ini secara operasional telah ditetapkan dalam Kepmendiknas No. 44 tahun 2002 tentang Komite Sekolah.

Selain itu, UU No. 25 tahun 2000 mengenai Program Pembangunan Nasional menegaskan bahwa bahwa program pendidikan Pra-Sekolah, Pendidikan Dasar dan Menengah adalah mewujudkan pendidikan berbasis masyarakat/sekolah. Melalui pendidikan tersebut, warga sekolah memiliki kekuasaan penuh dalam mengelola sekolah.

Pelaksanaan otonomi di bidang pendidikan mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan serta meningkatkan pemerataan untuk memperoleh pendidikan. Salah satu bentuk partisipasi yang terbangun di masyarakat dalam pendidikan selanjutnya berupa komite sekolah. Dalam konteks ini, masyarakat bisa terlibat dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan, serta bisa memperoleh manfaat dari penyelenggaraan. Ini selanjutnya diikuti dengan dapat melakukan evaluasi atau kendali terhadap penyelenggaraan pendidikan, namun yang terbaik adalah keterlibatan dalam empat dimensi secara keseluruhan karena masing-masing variabel memiliki keterkaitan.

Penelitian Khairiwati (2001) tentang partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan menunjukkan bahwa partisipasi dipengaruhi oleh motivasi elemen masyarakat, latar belakang ekonomi masyarakat, serta keberhasilan sosialisasi. Salah satu indikatornya adalah sosialisasi kebijakan pemerintah tentang pentingnya peran masyarakat. Misalnya, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Kepmendiknas nomor 44 tahun 2002 tentang Komite Sekolah.

Penelitian Wiratno (2016) juga menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan cukup rendah. Bentuk partisipasinya beragam, akan tetapi bersifat pasif. Masyarakat biasanya menjadi anggota komite sekolah, jamaah rutin, serta aktif dalam kegiatan yang diadakan sekolah.

Untuk itu, Nurkolis (2003) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat akan terlaksana apabila (1) ada kemauan pihak

yang memiliki otoritas, termasuk kepala sekolah, untuk mendistribusikan kewenangan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat, (2) adanya kemauan masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya dalam ambil bagian penyelenggaraan pendidikan.

Searah dengan hasil temuan di atas, Tilaar (1997) juga mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan melalui beberapa syarat, yaitu: (1) adanya kondisi pemberdayaan, (2) memberikan kesempatan agar masyarakat semakin berdaya, (3) perlindungan agar pemberdayaan berkembang, (4) meningkatkan kemampuan agar semakin berdaya, dan (5) fungsi dan peran pemerintah. Ini sesuai dengan kajian pada 24 sekolah di beberapa negara yang dilakukan melalui The Improving School Effectiveness Project yang menyatakan bahwa salah satu indikator karakteristik sekolah efektif adalah adanya kemitraan antara sekolah dengan masyarakat. Kemitraan dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan, serta evaluasi pendidikan. Perbaikan bentuk kemitraan antar dua komunitas ini menjadi variabel penting dalam rangka perbaikan sekolah yang kurang efektif (Beath dan Martimore: 2005).

Berdasarkan beberapa konsep di atas, komite sekolah perlu dipandang sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan untuk memperbaiki sekolah. Masyarakat dianggap pemegang saham dalam pendidikan, bukan sekedar pengontrol dan menjadi obyek pendidikan. Mereka merupakan sebagai peserta dalam perbaikan sekolah, terutama peningkatan mutu pendidikan karena untuk mewujudkan pendidikan berbasis masyarakat yang berkarakter pendidikan mandiri memerlukan kerjasama kolaboratif dan produktif antara seluruh elemen masyarakat dan pemimpin sekolah (Suparno: 2003).

Penelitian Jumiyati (2005) juga menyatakan bahwa 70,6 % siswa di sekolah yang efektif ternyata dipengaruhi oleh dukungan orang tua dalam pembelajaran. Dukungan orang tua atau masyarakat ini bervariasi yang dimulai dari keterlibatan

orang tua dalam pengembangan sekolah, misalnya penyediaan sarana, memberi masukan, serta turut mengawasi pelaksanaan pendidikan. Kontribusi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan terbukti membuahkan hasil signifikan terhadap perbaikan pendidikan.

Keterlibatan masyarakat secara penuh dalam mengelola pendidikan inilah yang menjadi tujuan utama dalam pendidikan berbasis masyarakat. Sebab jika masyarakat telah terlibat berarti kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pendidikan telah terpenuhi. Selain kesadaran sudah muncul, tanggung jawab masyarakat sudah tumbuh. Inilah wujud pendidikan berbasis masyarakat yang diharapkan.

Wujud pendidikan berbasis masyarakat ini secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan pada setiap satuan pendidikan

karena dengan penanganan yang dikelola secara bersama-sama antara sekolah dan masyarakat, ini akan terjadi pendampingan yang intensif terhadap proses pendidikan. Pendidikan terjadi baik di sekolah, lingkungan keluarga, maupun masyarakat.

Berdasarkan dari berbagai temuan penelitian di atas, model kerjasama komite sekolah yang selama ini dilaksanakan masih perlu diperbaiki dan dikomunikasikan agar terprogram dan terarah pada pengembangan lembaga pendidikan. Hal ini bisa diawali dengan melakukan pemahaman terhadap komite sekolah dan kepala sekolah terkait dengan Kepmendiknas nomor 44 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Untuk lebih detailnya, di bawah ini dipaparkan tabel tingkat kerjasama antara Komite Sekolah dan Kepala Sekolah di Kalimantan Selatan:

Tabel 1 Kerjasama Komite Sekolah dengan Kepala Sekolah untuk Bidang Pertimbangan

Indikator Kinerja Komite Sekolah Dan Kepala Sekolah	Kategori Kerjasama
<b>Perencanaan Sekolah</b>	
Mengidentifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat	Sedang
Memberi masukan dalam penyusunan RAPBS	Rendah
Menyelenggarakan rapat RAPBS (sekolah, masyarakat dan orang tua siswa)	Sedang
Memberi pertimbangan perubahan RAPBS.	Rendah
Berpartisipasi dalam mengesahkan RAPBS bersama kepala sekolah	Sedang
<b>Pelaksanaan Program (Kurikulum, PBM, dan Penilaian)</b>	
Memberi masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah	Sedang
Memberi masukan terhadap proses pembelajaran kepada para guru	Sedang
<b>Pengelolaan Sumber Daya Pendidikan</b>	
Identifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat	Tinggi
Memberi pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah	Rendah
Memberi pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di sekolah	Sedang
Memberi pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah	Rendah

Sumber: Analisis Kuesioner

Tabel di atas memperlihatkan secara jelas bahwa dalam bidang pertimbangan perencanaan sekolah, pelaksanaan program, dan pengelolaan sumber daya pendidikan yang dilakukan secara kerjasama antara kepala dan komite sekolah secara rata-rata berada di kategori sedang sehingga upaya untuk bisa bersinergi dalam konteks

perencanaan program dan kegiatan sekolah belum sepenuhnya mampu dikerjakan secara baik dan tepat waktu. Apa yang tampak dalam tabel di atas sesungguhnya patut disebut bahwa koordinasi kepala sekolah dan komite sekolah dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan untuk kegiatan

sekolah belum dijalankan secara baik dan benar, sesuai target yang direncanakan.

**Tabel 2 Kerjasama Komite Sekolah dengan Kepala Sekolah untuk Bidang Pendukung**

Indikator Kinerja Komite Sekolah Dan Kepala Sekolah	Kategori Kerjasama
<b>Pengelolaan Sumber Daya</b>	
Mengamati kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah	Rendah
Mobilisasi guru sukarelawan dalam menanggulangi kekurangan guru di sekolah	Rendah
Mobilisasi tenaga kependidikan non guru dalam mengisi kekurangan di sekolah	Sedang
<b>Pengelolaan Sarana dan Prasarana</b>	
Mengamati kondisi sarana dan prasarana di sekolah	Sedang
bantuan sarana dan prasarana sekolah	Tinggi
Mengkoordinasikan dukungan sarana dan prasarana sekolah	Sedang
Sedang Mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana sekolah	Tinggi
<b>Pengelolaan Anggaran</b>	
Mengamati kondisi anggaran pendidikan di sekolah	Sedang
Memobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah	Rendah
Mengkoordinasikan dukungan anggaran terhadap pendidikan di sekolah	Sedang
Mengevaluasi pelaksanaan terhadap dukungan anggaran di sekolah	Tinggi

Sumber: Analisis Kuesioner

Tabel 2 di atas terkait pengelolaan sumber daya, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan anggaran secara rata-rata juga masih dalam kategori sedang sehingga menjadi wajar apabila kemampuan dalam bidang pendukung untuk terlaksananya program pendidikan di sekolah juga tidak dan kurang mampu dilakukan secara optimal. Dampak paling nyata adalah tiadanya koordinasi maksimal serta optimal antara kepala sekolah dengan komite sekolah kemudian mempersulit

capaian program pendidikan di sekolah. Konteks pengelolaan sumber daya sangat jelas sangat minus koordinasi; pengelolaan sarana dan prasarana berada dalam kategori sedang sehingga tidak mendukung upaya dalam konteks pengelolaan sumber daya. Akibatnya, sebagai upaya pengelolaan anggaran demi kepentingan pengelolaan sumber daya dan sarana prasarana, ini menjadi lemah dalam proses pelaksanaan dan hasil yang akan dicapai.

**Tabel 3 Kerjasama Komite Sekolah dengan Kepala Sekolah untuk Bidang Pertimbangan Bidang Pengontrol**

Indikator Kinerja Komite Sekolah Dan Kepala Sekolah	Kategori Kerjasama
<b>Pengontrol Perencanaan Pendidikan di Sekolah</b>	
Mengontrol proses pengambilan keputusan di sekolah	Sedang
Mengontrol kualitas kebijakan pendidikan	Sedang
Mengontrol proses perencanaan pendidikan di sekolah	Tinggi
Pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah	Sedang
Pengawasan terhadap kualitas program sekolah	Sedang
<b>Pemantau Pelaksanaan Program Sekolah</b>	
Memantau organisasi sekolah	Sedang
Memantau penjadwalan program sekolah	Sedang
Memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah	Sedang
Memantau sumber daya pelaksana program sekolah	Tinggi
Memantau partisipasi stake-holder pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah	Rendah

Pemantau <i>Out Put</i> Pendidikan	
Memantau hasil ujian akhir	Rendah
Memantau angka partisipasi sekolah	Sedang
Memantau angka mengulang sekolah	Rendah
Memantau angka bertahan di sekolah	Rendah

Sumber: Analisis Ku<sup>3</sup>ner

Tabel 3 di atas menjelaskan bahwa kerjasama kepala sekolah dan komite sekolah di bidang pengawasan terkait perencanaan pendidikan di sekolah, pelaksanaan program di sekolah, dan out put pendidikan berada dalam kategori sedang. Hal ini ketika perlu dijelaskan secara lebih

jelas adalah bahwa baik kepala sekolah maupun komite sekolah masih lemah dalam bidang pengawasan. Indikator<sup>1</sup> adalah ketika melakukan pemantauan hasil ujian akhir, angka mengulang sekolah, dan angka bertahan di sekolah. Secara rata-rata, semuanya berada di posisi rendah.

**Tabel 4 Kerjasama Komite Sekolah dengan Kepala Sekolah untuk Bidang Pertimbangan Bidang Penghubung**

Indikator Kinerja Komite Sekolah Dan Kepala Sekolah	Kategori Kerjasama
<b>Perencanaan</b>	
Menjadi penghubung antara komite sekolah dengan masyarakat, komite sekolah dengan sekolah, dan komite sekolah dengan dewan pendidikan	Sedang
Mengidentifikasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan	Sedang
Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada kepala sekolah	Sedang
<b>Pelaksanaan Program</b>	
Mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat	Sedang
Memfasilitasi berbagai masukan kebijakan mengenai program terhadap sekolah	Rendah
Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program di olah	Sedang
Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah	Sedang
<b>Pengelolaan Sumber Daya Pendidikan</b>	
Mengidentifikasi kondisi sumber daya sekolah	Sedang
Mengidentifikasi sumber-sumber daya masyarakat	Tinggi
Memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah	Sedang
Mengkoordinasikan bantuan masyarakat	Sedang

Sumber: Analisis Ku<sup>3</sup>ner

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa peran kepala sekolah dan komite sekolah di bidang hubungan kemasyarakatan hampir secara rata-rata berada di posisi sedang sehingga hal sedemikian ini memperlambat komunikasi resiprokal antara kepala sekolah dan komite sekolah di kedua belah pihak. Hampir mereka berdua lebih sibuk dengan tugas masing-masing tanpa kemudian melakukan upaya lintas komunikasi untuk memerankan diri sebagai pelaku pendidikan di sekolah dengan kehidupan masyarakat secara lebih luas di luar sekolah.

Dengan demikian, komite sekolah dan kepala sekolah telah melakukan kerjasama dengan berbagai bentuk kegiatan, namun kerjasama yang dilakukan belum berbasis program dan masih bersifat insidental. Oleh karena itu, ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan Kepmendiknas Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

#### SIMPULAN

Model kerjasama antara komite Sekolah dengan kepala sekolah dilakukan dengan cara kepala sekolah menangani

persoalan di sekolah dan komite sekolah lebih berkonsentrasi pada sarana prasarana. Kerjasama belum dilakukan dengan berbasis pada program, akan tetapi lebih cenderung dilaksanakan dengan mengacu pengalaman saja. Komite sekolah lebih berkonsentrasi pada pengadaan sarana dan kepala sekolah berkonsentrasi pada kegiatan pembelajaran sehingga belum semua aspek kerjasama terjalin dengan baik.

Komite sekolah dalam melakukan kerjasama dengan kepala sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan belum sesuai dengan arah Kepmendiknas Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Hal ini disebabkan belum adanya pemahaman secara jelas tentang keputusan menteri tersebut. Bahkan

sebagian besar komite sekolah dan kepala sekolah belum memiliki dan memahami Kepmendiknas yang mengatur tentang Komite Sekolah.

Ke depannya, komite sekolah dan kepala sekolah hendaknya meningkatkan kerjasama agar pengelolaan sekolah agar menjadi terfokus dan berintegrasi antara kepentingan sekolah dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, dewan pendidikan perlu melakukan sosialisasi Kepmendiknas Nomor 44 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan akhirnya dapat meningkatkan kinerja kepala sekolah dan komite sekolah.

## 10. Jur\_Nasional\_Kajian Kerjasama Kepsek dengan Komite Sekolah

### ORIGINALITY REPORT

<b>19%</b>	%	%	<b>19%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Negeri Makassar</b> Student Paper	<b>6%</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia</b> Student Paper	<b>5%</b>
<b>3</b>	<b>Submitted to Pascasarjana Universitas Negeri Malang</b> Student Paper	<b>3%</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>Submitted to Universitas Terbuka</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>Submitted to Universitas International Batam</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>Submitted to UIN Sunan Gunung DJati Bandung</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>Submitted to iGroup</b> Student Paper	<b>1%</b>

9	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
10	Submitted to Murdoch University Student Paper	<1%
11	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%
12	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1%
13	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	<1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 10 words